

SASTRA, SARA, DAN POLITIK SALAH PAHAM



UNIVERSITAS GADJAH MADA

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Sosiologi Sastra
pada Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada**

**Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
Tanggal 29 April 2025**

**Oleh:
Prof. Dr. Aprinus Salam, M.Hum**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Kemuliaan bagi kita semua,

Yang saya hormati,

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas
Gadjah Mada,

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah
Mada,

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah
Mada,

Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada,

Para Dekan, Ketua Pusat Studi, dan Lembaga di Lingkungan
Universitas Gadjah Mada,

Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah
Mada,

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Gadjah Mada,

Segenap Sivitas Akademik Universitas Gadjah Mada,

Para tamu undangan, kolega, anggota keluarga, teman-teman
mahasiswa, dan hadirin sekalian.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas curahan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Balai Senat Universitas Gadjah Mada dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang, insyaallah, baik. Hari ini merupakan hari yang penting bagi saya karena saya mendapat kesempatan dan kehormatan untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar, sehubungan dengan pengangkatan diri saya sebagai guru besar, dalam bidang Sosiologi Sastra di Fakultas Ilmu Budaya UGM.

Perlu saya sampaikan bahwa saya berterimakasih kepada Prof. Wening dan Prof. Setiadi yang telah membaca teks pidato ini sebelumnya. Prof. Wening telah membesarkan hati saya untuk meneruskan teks pidato ini. “Sudah kontekstual. Potensi-potensi breidel dan lain-lain akan semakin marak.” Demikian pernyataan beliau.

Namun, ada saran dari Prof. Setiadi, dan saya sangat sepakat, agar saya mencoba mengartikulasikan jejak-jejak kajian dan pemikiran saya di bidang sastra. “Saya ingin juga *njenengan* “mempromosikan” pemikiran berdasarkan rekam jejak karya-karya *njenengan*.” Demikian sepenggal catatan Prof. Setiadi. Saran yang menyadarkan dan sangat menantang, tetapi sekaligus tentu berat.

Karena saran tersebut, saya mengingat tesis saya (2003, 2019) tentang kenapa penyair Indonesia menulis sastra sufi pada pada tahun 1980-an hingga tahun 1990-an. Salah satu jawabnya karena penyair waktu itu seperti bersiasat untuk menulis sesuatu yang spiritualis agar “tidak cukup dipahami” aparat negara. Juga saya mengingat disertasi saya bagaimana novel-novel Indonesia yang terkenal pada tahun 1980-an dan 1990-an mengalihkan *setting* ke desa-desa dan mentransformasi tokoh-tokohnya sebagai orang penting di desa-desa. Strategi itu dilakukan agar novel-novel terkesan jauh berbicara tentang politik kekuasaan pusat di kota seperti Jakarta. Hal yang ingin saya garis bawahi adalah bagaimana negara (lebih tepatnya pemerintah yang berkuasa) memegang peranan penting bagaimana sastra diproduksi dan dikonsumsi.

Alur lain dari karakter sastra di Indonesia yang juga perlu digugat adalah kegagalan sastra menggali persoalan-persoalan agama, masalah-masalah suku dan ras, juga perasaan tidak nyaman mengeksplorasi politik kepentingan golongan-golongan. Beberapa artikel, yang sepenggal-sepenggal membicarakan hal itu sudah pernah saya tulis, misalnya “Politik Masyarakat, Negara, dan Kesenian” (2014); “Literasi Politik dan Sastra Partisan” (2019). Dalam berbagai tulisan di media massa, perhatian saya terhadap karakter dan peran negara dalam mengelola masyarakat, agama, dan kepentingan golongan, termasuk masalah sastra dan kebudayaan, sudah cukup lama saya perhatikan yang kemudian dikumpulkan dalam bentuk buku, yakni *Biarkan Dia Mati: Refleksi Manusia dan Kebudayaan Indonesia* (2001), *Politik dan Budaya Kejahatan* (2014) dan *Biokultural Dari Fantasi Kerakyatan Hingga Menolak Identitas* (2020).

Seperti kita tahu, tentu belakangan sastra Indonesia banyak berubah, yakni ketika Orde Baru menjadi masa lalu, juga ketika arus demokrasi dan HAM sedikit lebih membesar. Itulah sebabnya, mohon izin, saya menyampaikan pidato dengan judul ***Sastra, SARA, dan Politik Salah Paham***.

Hadirin yang saya muliakan,

Hingga Maret 2025, terdapat lomba penulisan antologi puisi nasional, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Dalam kegiatan tersebut, yang menarik, dan penting untuk diperhatikan, dari waktu ke waktu, ada kriteria atau peraturan bahwa dalam menulis karya sastra, syarat untuk bisa disertakan dalam lomba adalah bahwa karya sastra (contoh yang saya ambil soal penulisan puisi) tidak boleh menyinggung atau mempersoalkan SARA. (Kadang kita tidak perlu lagi memberi informasi apa kepanjangannya, karena kita sudah tahu semua apa itu kepanjangan SARA. Akan tetapi, dengan “terpaksa” tetap saya sebut kepanjangannya, yakni Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Aturan atau syarat menulis karya sastra seperti itu, diduga karena adanya semacam kelatahan, dan sekaligus ketakutan, yang telah tertanam sejak lama. Pada masa kolonial (pemerintahan Hindia Belanda), Nota Rinkes (1910), sebagai institusi pemerintah yang menangani urusan penerbitan buku, termasuk karya sastra, memberi aturan bahwa karya sastra dilarang menyinggung beberapa hal berikut. Nota Rinkes tersebut antara lain mengatur agar sastra 1) netral dari agama; 2) tidak mengandung unsur politik; dan 3) tidak menyinggung kesusilaan (Kratz, 2000).

Salah satu korban karya sastra yang dihilangkan karena dinilai ada “kandungan SARA-nya”, sebelum diterbitkan, adalah novel *Salah Asuhan* (Moeis, 1928). Dalam draf awalnya, novel tersebut dianggap menyinggung ras Barat (Belanda) yang diceritakan bahwa salah satu tokoh penting dalam novel tersebut seperti berperilaku sebagai wanita murahan (pelacur). Pada masa itu, para sastrawan yang ingin menulis lebih bebas, tentu naskahnya tidak bisa diterbitkan, dan jika diterbitkan

juga, jadilah sastra liar (*bacaan liar*) (Razif, 2021). Penulisnya terancam diburu dan tentu akan dipersoalkan secara hukum.

Namun, jauh sebelum Indonesia menjadi negara yang bebas kolonial, pertentangan soal perbedaan, tapi lebih-lebih menjadi politik tafsir—dan nanti saya menyebutnya sebagai politik salah paham—terhadap karya sastra dan implikasinya, salah satu yang terkenal adalah dengan dihilangkannya karya-karya Hamzah Fansuri pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani tahun 1637 M (Djamaris & Prijanto, 1995, hlm. 2). Pemikiran Fansuri, yang sebagian tertulis dalam karya sastra, seperti “Syair Burung Unggas” atau “Syair Burung Pingai” merepresentasikan ketiadaan pembatas antara manusia dan Mahbubnya (Hasmy, 1984, hlm. 8). Syair tersebut dianggap memperkenalkan *wahdatul wujud* yang berbahaya bagi orang Islam yang pengetahuan agamanya tidak cukup memadai. Dengan preseden pertentangan politik di antara para “kiyai ulama kerajaan”, serta politisasi yang dilakukan Ar-Raniri, sejumlah karya sastra Fansuri dibakar dan beberapa pengikutnya diburu dan dibunuh.

Salah satu peristiwa lain yang terkenal, Amerika pernah mengalami perang sipil yang menyebabkan terbunuhnya ratusan ribu manusia. Perang tersebut diduga salah satu pemicunya adalah novel *Uncle Tom’s Cabin* karya Harriet Beecher Stowe (1852). Karena banyak masyarakat Amerika yang ikut membaca novel tersebut, sebagai akibatnya, masyarakat terhasut untuk memusuhi dan memerangi rasisme. Jadi, dalam konteks tersebut, sastra memang menghasut soal ras, tetapi hasutan sastra adalah hasutan untuk anti-rasisme.

Kita tentu menolak perang dan terjadinya pembunuhan. Akan tetapi, hidup dalam hierarkisasi ras tentu menghina martabat dan kesetaraan manusia. Perang untuk memperjuangkan martabat kesetaraan manusia bisa jadi lebih terhormat daripada “tidak berani perang”, tetapi hidup dalam kehinaan.

Beberapa karya Aristoteles pernah dibakar karena dianggap murtad oleh para pendeta. Hal tersebut dikarenakan pembelanya, dan kebetulan dianggap sebagai muridnya, tetapi sangat berkuasa, Iskandar Agung (*Alexander the Great*) wafat. Masih untung karena sebagian

karya Aristoteles sempat diselamatkannya dan sebagian dilarikan ke Athena. Aristoteles pernah memberikan catatan awal bagaimana karya-karya literasi, khususnya karya sastra, dimusnahkan pada zaman itu. Aristoteles pernah mencatat dalam *On Poets (Tentang Para Penyair)*, mengenai beberapa buku yang kini tidak bisa ditemukan lagi. Dalam catatannya, puisi-puisi karya Empedocles tersebut justru dibakar oleh saudara perempuannya sendiri. Menurut Baez (2013) puisi-puisi Empedocles menyiratkan sentimen religius dan dinilai menoreh-luka religiusitas sehingga menjadi alasan penghancuran buku itu.

Kasus lain, Boris Pasternak dengan karyanya *Doctor Zhivago* (1958), peraih Nobel Sastra 1958 dari Rusia, mendapat tekanan luar biasa dari pemerintahnya sendiri. Pemerintah berkuasa menuduh bahwa karya tersebut merusak pikiran, karya yang kotor dan jahat yang dipoles secara artistik. Karya yang diterbitkan di Italia tersebut, bukan di negara Pasternak, mencuri perhatian dunia. Pasternak terpaksa menolak penghargaan nobel karena merasa sedikit ketakutan terhadap teror negaranya sendiri. Di Inggris, novel James Joyce pernah dilarang dari tahun 1932-1936, walaupun orang yang bertanggung jawab terhadap larangan tersebut baru membaca *Ulysses* (1922) 44 halaman dari 732 halaman.

Senyampang dengan kisah lama tersebut, masyarakat dunia pernah dihebohkan dengan novel Salman Rushdie *The Satanic Verses* (2008). Bagian yang riskan adalah bab “Ayat-Ayat Setan” yang menceritakan sosok Nabi Muhammad dan tiga dewi pagan, Allat, Uzza, dan Manat. Dalam bagian ini, Rushdie menggambarkan Nabi Muhammad sebagai seorang pria yang lemah dan peragu. Sebagian umat Islam pasti marah dan tersinggung dan memburu Rushdi hingga kini untuk, kalau bisa, ditangkap dan di dibunuh.

Tentu cukup banyak perdebatan tentang kasus novel Salman Rushdie tersebut, antara yang menghujat dan yang membela. Dalam perdebatan tersebut, kedua belah pihak saling membangun argumen. Buku-buku penting ilmu pengetahuan, dan sejarah kembali dibuka, kembali dicermati, juga dikritisi, dan diformulasikan secara berbeda untuk membangun agar argumen dapat dinilai benar. Yang menarik

adalah, baik dalam jalur pembela maupun penghujat Rushdi, kedua belah pihak melakukan hal yang sama. Dalam kedua sisi yang bertentangan, ilmu pengetahuan berkembang dan dunia dilihat dengan cara yang lebih progresif.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintahan Orde Lama tampaknya masih memanfaatkan jejak-jejak aturan Nota Rinkes tersebut. Karena perbedaan haluan dan persepsi tentang politik, beberapa sastrawan (seniman) dihajar oleh pemerintah Orde Lama. Sastrawan yang sempat dipenjarakan oleh Orde Lama seperti Mochtar Lubis, salah seorang tokoh yang menonjol pada masa Soekarno (dan juga pada masa Orde Baru). Ia menulis beberapa karya seperti *Senja di Jakarta* yang pertama kali diterbitkan pada 1963 (1992), *Tanah Gersang* pada 1964 (1982), serta *Maut dan Cinta* pada 1977 (1993). Novel-novel yang secara kritis membongkar busuknya politik kekuasaan.

Hal yang mungkin masih membekas, dan sebagian besar sahabat dan saudara saya yang hadir di sini ikut menjadi saksi, adalah bagaimana pemerintah Orde Baru mengelola negara, mengelola karya-karya warganya, khususnya sastra. Kita masih ingat bagaimana pemerintah Orde Baru melarang sejumlah karya sastra, bahkan sebagian sastrawan dan penyairnya dibuat menderita dan tidak jelas nasibnya. Katakanlah tetralogi *Bumi Manusia* Pramoedya Ananta Toer, yang tahun ini diperingati 100 tahun kelahirannya. Beberapa teman yang pernah menjual karya-karya Pram, masuk penjara. Pada waktu itu (karena sekarang karya itu sudah bebas beredar), apa yang ditakuti negara terhadap sastra seperti *Bumi Manusia* (1980) tersebut?

Yang ditakuti karena novel tersebut membongkar, menelanjangi, dan memperlihatkan implikasi-implikasi ideologis yang dipraktikkan secara keliru oleh kekuasaan. Novel tersebut menelanjangi rasisme kolonial, menelanjangi feodalisme, menelanjangi ketimpangan gender, serta menelanjangi kapitalisme. Novel tersebut juga menggiring kita untuk bertahan dalam rasionalisme yang lebih manusiawi dalam dunia yang setara. Kekuasaan yang dominan tentu tidak mau itu terjadi karena akan melemahkan kekuasaannya.

Dalam kasus yang berbeda, kita juga ingat nasib Tabloid *Monitor* (1990) ketika Arswendo Atmowiloto menulis tentang Nabi Muhammad, dan sebagainya. Pemerintah, dan terutama masyarakat Islam, merasa sangat tersinggung dengan tulisan Arswendo karena tulisan itu menempatkan Muhammad sebagai tokoh yang dikagumi di bawah Arwendo sendiri. Tidak kalah hebohnya, seorang penyair miskin dan lemah, seorang buruh pada sebuah pabrik, Widji Thukul, juga ditakuti negara karena puisi-puisinya. Thukul dalam kumpulan puisinya *Nyanyian Akar Rumput* (2014) dan *Aku Ingin Jadi Peluru* (2000) tidak secara langsung berbicara tentang suku, agama, dan ras, tetapi lebih menyerang *golongan* elite yang sedang berkuasa.

Pembicaraan ringkas ini mencoba mengelaborasi kembali bagaimana pemerintah, atas nama negara, yang mengelola dan mengatur masyarakat, memperlakukan dan menyelenggarakan politik tafsir (dan politik salah paham) yang berimplikasi terhadap kebijakan dan keputusan politik, khususnya terkait dengan persoalan SARA. Sebagai akibatnya, dalam mengekspresikan gagasan, pemikiran, dan bahkan sekedar berwacana, berimajinasi, dan berfiksi, masyarakat mengalami pendangkalan paham, atau sebaliknya, mendapatkan legitimasi untuk tidak berbicara tentang politik (dan politisasi) suku, agama, ras, dan antargolongan.

Secara sehari-hari, di beberapa grup WhatsApp, yang saya, (*kok ya bisa masuk dalam grup itu*), jika ada salah satu yang posting berbau SARA, maka akan mendapat teguran; “Mohon saudara-saudaraku yang ada di grup ini agar tidak memposting hal-hal berbau politik fanatisme SARA karena akan mengganggu kekompakan dan persaudaraan di antara kita”. Sebagai akibatnya, beberapa grup WhatsApp yang saya terpaksa ikut di dalamnya tidak lebih hanya menjadi hujan pernyataan “selamat pagi, selamat malam, semoga kita hidup dalam keadaan damai dan sejahtera.”

Kemudian, yang tidak kalah banyaknya adalah posting “mantab, keren, luar biasa”, atau “alhamdulillah, “aamiin, aamiin, aamiin,” dan segudang basa-basi lainnya. Efek pelarangan membicarakan SARA menjadi panoptikon yang hegemonik sehingga begitu banyak yang

menjadi serba ketakutan. Dalam hal tersebut masyarakat takut berbeda, takut menyinggung perasaan, takut diketahui negara bahwa kekompakan (persatuan) menjadi sub-ordinasi terhadap perbedaan. Padahal, jika mengacu Pancasila, jika ditafsirkan secara lebih logis, justru mengakui adanya perbedaan SARA dan karenanya kita perlu bersatu, bukan kita bersatu dan oleh karena itu kita tidak boleh berbeda.

Walaupun, sebaliknya, tentu saja terdapat pula grup-grup politis yang luar biasa kritisnya kalau berbicara tentang politik dan ekonomi. *Saking* kritisnya, keluarlah kata-kata dan berbagai pernyataan yang kasar dan kotor. Hal tersebut terjadi karena kita memang tidak terlatih dengan baik berbicara tentang politik dan ekonomi, apalagi jika hal tersebut menyangkut SARA. Untunglah, untuk bersikap kritis dan politis, karya sastra tidak memiliki ketegaan untuk mengunggah kata-kata kasar dan kotor karena hal itu jelas di luar koridor semangat bersastra untuk tetap menjaga harkatnya sebagai tulisan yang sedapat mungkin memiliki kesantunan.

Pada masanya, implikasi dari kebijakan pemerintah tersebut, yang, sedikit banyak tercermin dalam UU Anti Subversi, peraturan terkait Pengawasan Melekat (Waskat), UU ITE, memberikan dan membuka kesempatan bagi penguasa dan warga untuk melakukan hal-hal “salah paham” dan menjadi argumen dalam berbagai pembelaan dan penyerangan bila terjadi perbedaan pendapat.

Persoalannya, apakah kita tidak paham dengan adanya situasi kesengajaan salah paham tersebut. Sayangnya, kita paham. Hal salah paham yang telah dijelaskan tersebut bukan ingin mengatakan bahwa “kita tidak tahu”, tapi justru sebagian kita mencoba “pura-pura tidak tahu”, “tahu tapi tidak berani”, atau memang “sebagian tidak mengikuti jadi tidak tahu”, atau memang adanya kesengajaan “politisasi tafsir”. Jejak-jejak tersebut masih bisa dirasakan hingga kini.

Hadirin yang saya hormati,

Salah satu pencarian panjang dalam ilmu sastra, yang berdasarkan kesepakatan objek materialnya adalah karya-karya sastra, atau teks-teks yang dianggap seperti puisi, novel, cerpen, dan sebagainya, adalah

pencarian, dan upaya menjelaskan, hal-hal di dalam, di balik, yang tersembunyi, bahkan hal yang tidak ada di dalam karya sastra itu sendiri. (Tidak jarang saya sering bercerita kepada mahasiswa; kita itu seperti kurang kerjaan (*kurang gawean*), mengada-ada, bisa jadi yang kita pelajari itu kalah, dan memang begitu, dengan kebenaran versi kekuasaan.)

Terlepas dari itu, dalam hal *kurang gawean* tersebut, muncullah berbagai asumsi dan dugaan, yang melahirkan berbagai teori sastra. Untuk pembicaraan di sini, saya hanya akan menyinggung bagaimana para elite kekuasaan (pada tataran struktur bernegara) berhasil mengkonstruksi kesadaran palsu seperti yang dijelaskan oleh Marx (1887). Pemikiran ini kemudian diteruskan oleh pemikir-pemikir sosiologis untuk kajian sastra yang kemudian dikenal sebagai teori posmarxis, terutama Žižek (1989, lihat juga Salam, 2023), misalnya. Salah seorang ilmuwan sastra di Indonesia, khususnya di FIB UGM, yang secara sistematis mengajarkan teori marxis dan posmarxis adalah Prof. Faruk (2010).

Dengan teori kesadaran palsu Marx, dan kesadaran sinis Žižek, kita mendapat pelajaran bahwa pengetahuan-pengetahuan yang seolah menjadi ideologis, termasuk di antaranya soal agama, ideologisasi suku dan ras, juga terjadinya pengelompokan golongan (identitas) justru membuat sekat-sekat yang menjauhi dan menghalangi kita memahami Kebenaran. Akan tetapi, itu pula yang sengaja dikondisikan oleh negara agar warga negara bisa dikendalikan.

Dalam metodologi yang berbeda, teori yang dikembangkan oleh Deleuze (1977) diadopsi oleh ilmu sastra untuk menelusuri hingga ke pelosok-pelosok terdalam batin manusia, apa yang disebut sebagai mesin hasrat. Proses dan mekanisme metodologis tersebut, sebenarnya hanya berusaha mencari tahu dan menjelaskan Kenyataan (Kebenaran) yang belum terungkap dan tersembunyi dalam karya sastra.

Apa yang dikandung karya sastra dan kenapa pula negara dan masyarakat tidak jarang takut terhadap karya sastra tertentu? Pemikir dan filsuf beken Prancis, Alain Badiou, dalam tulisannya yang berjudul *Being and Event* (2005, hlm. xiii) berkesimpulan bahwa praktik-praktik

hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari upaya-upaya pencarian terhadap kebenaran. Badiou menawarkan empat prosedur kebenaran tersebut, yakni seni, cinta, politik, dan sains atau ilmu-ilmiah (Vilaça, 2014, hlm. 252). Dalam hal ini adalah dua, bisa juga tiga, yakni cinta, politik, dan ilmu-ilmiah, berkemungkinan berjalan secara empirik dalam kehidupan dan tentu saling berkorelasi/saling mendukung.

Akan tetapi, kemungkinan yang paling signifikan adalah jalan seni (dalam hal ini khususnya sastra) bisa mengemas secara langsung keempat prosedur tersebut dalam suatu pencarian kebenaran. Dalam hal ini, bagaimana karya sastra membongkar, menelanjangi, atas nama fiksi, hal-hal yang sulit dibicarakan, yang sulit dibuka, dengan bebas, dengan pretensi pencarian kebenaran itu sendiri (Wellek dan Warren, 1989). Salah satu novel yang berusaha membongkar lapis ideologisasi agama, yakni novel Okky Madasari berjudul *Maryam* (2012). Novel tersebut mengisahkan seorang perempuan dari komunitas Ahmadiyah yang meninggalkan keyakinannya demi menikahi pria di luar agamanya. Akan tetapi, akhirnya menghadapi kegagalan pernikahan dan keterasingan. Saat kembali ke kampung halamannya di Lombok, ia menemukan komunitasnya mengalami diskriminasi dan pengusiran. Maryam menghadapi dilema antara berjuang bersama mereka atau mencari jalan hidupnya sendiri.

Sastra sebagai suatu ekspresi seni, berpeluang besar mempersoalkan berbagai peristiwa yang “menjadi fakta”, membongkar manipulasi data-data statistik, membongkar kabar yang katanya “fakta politik”, membongkar fakta “proses ideologisasi ilmu-ilmiah, membongkar hal-hal “atas nama cinta”, menguliti rasisme, bahkan memusuhi kemunafikan beragama. Tentu terdapat beberapa prosedur lain yang bisa saja seolah bertumpang tindih karena kita tidak berpretensi untuk mengklaim bahwa jalur-jalur pencarian kebenaran bisa dan perlu dimonopoli oleh salah satu jalur kuasa yang dominan.

Sastra bisa saja kemudian berhadapan dengan, dan ketika, ada kekuasaan yang “atas nama hukum”, “atas nama agama”, atau “atas nama norma sosial“, yang seolah tidak boleh dipersoalkan lagi. Dulu, novel Ahmad Tohari, *Ronggeng Dukuh Paruk* (2003), pernah dihujat

bahwa novel itu seperti mengajarkan pembaca, terutama kalau dibaca anak-anak, semacam umpatan *asu buntung* dan sebagainya. Kita bisa paham, bagaimana banyak orang bisa salah paham terhadap karya sastra.

Saya ingin memberikan beberapa ilustrasi lain bagaimana sastra bisa bercerita bahwa fakta-peristiwa itu bukan segala hal yang menyimpan kebenaran. Namun, fakta bisa mengandung kebenaran dengan membuktikan kesalahan dan kebenaran yang terjadi pada sebuah fakta-peristiwa. Sebagai misal, terdapat sebuah cerita (fiksi saya sendiri) yang bercerita tentang seorang yang fanatik dengan agamanya. Dalam berbagai dialog dan perjumpaan dengan tokoh lain, si fanatik itu mengatakan bahwa hanya orang seperti dirinya yang masuk surga, yang kafir tidak bisa masuk surga.

Cerita tersebut tidak bisa dikatakan menghina agama lain, apa lagi dengan mengatakan agama yang tidak sepaham dengan si fanatik tadi disebut kafir. Novel itu justru ingin mengatakan bahwa jangan jadi seseorang yang fanatis buta dan terlihat bodoh. Kisah seperti itu tentu sekali dua kita dengar juga dalam kehidupan sehari-hari. Navis (2002, terbit pertama kali 1956) pernah secara satiris menyindir hal tersebut dalam *Robohnya Surau Kami*.

Suatu cerita lain (fiksi saya sendiri. Karena kalau saya mengutip sesuatu, saya juga mengutip fiksi, terus apa bedanya) bercerita tentang bagaimana seseorang merencanakan dengan matang untuk membunuh tetangganya. Orang yang merencanakan pembunuhan tersebut sering merasa terganggu karena adanya perbedaan cara hidup, dan kebetulan, ada perbedaan suku dan ras di antara mereka. Di akhir cerita, pembunuhan tersebut memang terjadi. Karena memang dipersiapkan dengan matang, maka tidak ada yang tahu sehingga kehidupannya terus berlangsung.

Cerita tersebut seolah mengajarkan pembunuhan yang bisa dilakukan dengan baik dan benar. Juga seolah merestui bahwa ketidaknyamanan bertetangga bisa diselesaikan dengan cara itu, asal diselesaikan dengan rapi dan tidak ada yang mengetahui. Yang kadang sastra sering disalahpahami, masyarakat “tidak mau paham” bahwa

sastra sedang memperlihatkan, dan pembaca menjadi tahu, suatu karakter yang tidak benar dengan memperlihatkan secara rinci berbagai prosedur persiapan pembunuhan sebagai hal tidak benar.

Hadirin yang saya hormati,

Beberapa ilustrasi di atas hanya ingin mengatakan bahwa karya sastra, dengan berbagai cerita imajinatif dan fiksionalnya, membuka selubung-selubung tersembunyi yang kita tidak tahu dalam kenyataan hidup secara empirik, tetapi justru diberi tahu dalam karya sastra. Suatu fiksi yang imajinatif bukanlah kebohongan, hal itu berbeda dengan fiktif. Fiksi yang imajinatif adalah suatu penjelajahan sejauh-jauhnya terhadap begitu banyak realitas kehidupan yang belum atau tidak diketahui. Imajinasilah yang mampu menjangkau relung terdalam hati kita, relung terjauh yang bisa dipikirkan manusia.

Singkat kata dapat dikatakan, mengikuti Alain Badiou (2005), seni sastra adalah salah satu prosedur (suatu metode) pencarian kebenaran, atau *procedure of truth*. Tentu banyak jalan dan prosedur dalam pencarian kebenaran. Sekali lagi, sastra hanya salah satunya.

Novel-novel terkenal Amerika banyak yang membicarakan persoalan dan perbedaan ras, seperti *To Kill a Mockingbird* (1960), *Uncle Tom's Cabin* karya Harriet Beecher Stowe (1852), dan *Americanah* (2013). Novel-novel itu memang bermaksud menghasut, tetapi yang dihasut adalah bagaimana manusia harus menolak rasisme, atau menolak bahwa manusia berbeda karena rasnya berbeda. Sastra menghasut untuk anti-rasisme dengan menelanjangi kebusukan dan kesalahan berpikir rasisme. Implikasinya, ada manusia yang terhasut untuk melawan rasisme, maka pecahlah perang dengan manusia yang ingin menikmati rasisme. Perang pasti merugikan, tapi rasisme jauh lebih menghina manusia.

Banyak juga sastrawan Amerika dan tentu di banyak negara lain, termasuk Indonesia, menelanjangi dan membongkar, sebagai misal, kebusukan kapitalisme. Riset-riset non-sastra kadang mengalami keterbatasan karena terikat fakta dan data. Apalagi, banyak data bisa

dimanipulasi dan “diada-adakan” sehingga terjadi perbedaan tafsir antara yang mendukung dan mengecam ideologi-ideologi dominan.

Sastrawan dan sastra yang canggih, justru bisa menerobos itu semua karena sastra justru bisa menjangkau data-data yang tersimpan dalam hati nurani kita. Karya ilmiah mengalami kegagalan jika dituduh *ngawur* berbicara tanpa data. Padahal, justru data itu sendiri yang bermasalah. Data yang paling bersih ada dan tersimpan dalam hati nurani kita yang karya sastra bisa bicara atas nama itu.

Karya sastra itu juga menghasut dan menyinggung soal agama, tapi yang dihasut adalah agar manusia tidak merasa benar dengan agamanya sendiri-sendiri, seperti novel *Lusifer! Lusifer!* (2019). Fanatik dengan agamanya sendiri diharuskan, tapi bukan berarti fanatisme itu bisa dipakai untuk merendahkan atau menyalahkan agama lain. Sastra menghasut agar kita bisa menerima keyakinan yang berbeda-beda.

Belajar dari pengalaman pada masa Orde Baru dalam melarang tetralogi *Bumi Manusia*, para penasihat Orde Baru, dengan sengaja pura-pura tidak tahu, pura-pura salah paham dan memang dengan sengaja menyalahpahami bagaimana novel tersebut berbahaya (bagi kekuasaan yang menikmati hierarkisasi) —karena menggiring kita untuk menolak rasisme, kolonialisme, anti ketimpangan gender, serta anti ideologi-ideologi yang memapankan ketidakadilan dan diskriminasi.

Tanggapan para sastrawan terhadap represi ini tentu tidak seragam, tetapi banyak di antara mereka yang memilih jalur perlawanan. Beberapa sastrawan memilih jalur metaforis untuk menyamakan kritik mereka terhadap rezim, sementara yang lain secara terang-terangan menulis tentang ketidakadilan sosial, dengan risiko dibungkam atau bahkan dipenjara. Karya Seno Gumira Ajidarma *Saksi Mata* (1994) menjadi contoh bagaimana sastra tetap menemukan jalannya untuk mengungkap kebenaran meskipun dihadapkan pada kontrol ketat negara.

Kembali belajar ke kasus Nota Rinkes, Nota Rinkes muncul berdasarkan masukan para penasihat ahli pemerintah Kolonial, untuk

membantu dan mengondisikan bagaimana pemerintah mengelola penerbitan buku dan sastra khususnya (Rosidi, 1991). Ada beberapa persoalan terkait dengan pendapat para ahli kolonial tersebut.

Pertama, apakah para penasihat ahli tersebut tidak paham apa itu sastra, sehingga mereka memutuskan bahwa sastra tidak boleh menyinggung, apalagi menghasut terkait persoalan SARA. Anggap saja mungkin memang tidak paham. Tidak paham sastra, tetapi memutuskan persoalan sastra. Bahwa sastra adalah dunia imajinasi alternatif. Sastra adalah cara manusia berekspresi untuk memahami dirinya, sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya. Sastra adalah cara manusia mencari dan memperlihatkan kebenaran yang tersembunyi. Artinya, kesusastraan Indonesia berjalan karena adanya keputusan-keputusan orang yang tidak paham.

Kedua, akan tetapi, rasanya tidak mungkin para penasihat ahli tersebut tidak paham sastra. Mereka adalah para pakar (dalam konteks tertentu disebut orientalis) yang tentu saja dengan kualifikasi akademik tertentu. Yang mungkin terjadi adalah mereka paham, tapi pura-pura tidak paham atau pengetahuan sastranya disembunyikan, demi suatu tujuan politis yang lain. Dengan pura-pura tidak paham, mereka memutuskan nasib sastra. Di kemudian hari, sastra Indonesia berjalan karena politik salah paham ini.

Namun, *ketiga*, masih ada satu kemungkinan lagi, para pakar tersebut paham sastra dan memutuskan sastra harus bagaimana, agar sastra justru disalahpahami. Inilah yang terjadi, sastra telah berhasil disalahpahami. Politik salah paham itu kemudian menjadi alat negara untuk mengontrol sastra pada masa-masa berikutnya.

Yang tidak kalah konyolnya, *keempat*, bukan hanya sastra dengan sengaja disalahpahami, tetapi masyarakat tidak tahu kalau ada kesengajaan disalahpahami, dan sastra ditafsirkan dalam konteks kesalahpahaman tersebut. Bahkan yang kemudian terjadi, dengan argumen tidak boleh SARA dalam pengertian dan berdasarkan konstruksi salah paham itu, dipakai/dimanfaatkan negara untuk mengontrol, menekan, dan bahkan membuat hukum-hukum turunannya, yang menyebabkan rakyat Indonesia mengalami banyak

keterbatasan dalam mengembangkan kreativitas dan imajinasi-imajinasi alternatif terhadap kehidupan. Kalau itu yang terjadi, Indonesia mereproduksi ulang kolonialisme (rekolonialisme) terhadap warganya sendiri.

Itu pula sebabnya, seperti telah disinggung, sastra yang dianggap mempersoalkan SARA, jika itu dianggap membahayakan negara, maka sejumlah karya sastra telah dilarang terbit. Atau yang sudah terbit bisa dibreidel. Namun, di balik itu, konteks pelarangan SARA itu bukan lagi atas nama keamanan bangsa dan negara, tetapi lebih-lebih atas nama keamanan dan kepentingan kekuasaan politik tertentu.

Sebaliknya, masyarakat dan warga juga dibekali senjata SARA untuk melawan (bahkan menjahati) siapa saja yang tidak disukai atau menjadi lawan politik dan ekonomi tertentu. Sastra yang mengungkit SARA pun disalahpahami dan tidak diperkenankan. Dalam berbagai grup WhatsApp, kita menjadi sangat tidak nyaman, tidak terlatih, tidak suka, dan gampang terpancing ketidakpahamannya untuk boleh memposting soal SARA.

Negara yang benar tidak mungkin membiarkan masyarakat (rakyat) hidup dalam kesalahpahaman. Akan tetapi, kekuasaan akan terus mempertahankan kesalahpahaman itu sejauh bisa mengamankan dan melanggengkan kekuasaannya.

Memang, untuk konteks demokratisasi, terlihat proses-proses yang berjalan dengan berat. Teknologi dan media sosial secara gamblang dan vulgar ikut meramaikan proses demokratisasi. Dalam konteks pembicaraan ini, bukan karena negara melakukan proses pelonggaran dan berusaha lebih demokratis, melainkan pemerintah juga semakin tidak paham bagaimana sastra bekerja, bagaimana sastra terus menerus menjadi ajang dan ruang pencarian kebenaran, dengan caranya sendiri. Sastrawan dan masyarakat juga semakin cerdas.

Dalam konteks karya sastra, khususnya yang menyentuh isu-isu SARA, kesalahpahaman sering kali diperkuat oleh konstruksi sosial yang diwariskan dari masa lalu atau bahkan diciptakan ulang oleh kekuasaan demi kepentingannya sendiri. Sastra, dengan daya kritis dan reflektifnya, justru dapat menjadi ruang untuk membongkar bias dan

stigma yang melekat dalam masyarakat. Sayangnya, karya sastra yang mengangkat persoalan SARA kerap dianggap sebagai ancaman, baik oleh negara maupun kelompok-kelompok dominan yang merasa terganggu. Sikap defensif ini bukan hanya membatasi kebebasan berekspresi, tetapi juga menghambat masyarakat dalam memahami kompleksitas identitas dan sejarahnya sendiri.

Ironisnya, dalam era kebebasan informasi saat ini, keterbukaan yang dijanjikan sering kali tidak disertai dengan pemahaman yang lebih dalam terhadap perbedaan. Sastra yang membahas isu SARA dapat dengan mudah disalahartikan, ditarik ke dalam polarisasi politik, atau bahkan dijadikan alat propaganda. Padahal, salah satu kekuatan utama sastra adalah kemampuannya untuk menyajikan pengalaman manusia secara mendalam, tanpa terjebak dalam dikotomi hitam-putih. Justru dengan membaca dan memahami karya sastra yang mengangkat tema-tema sensitif ini, masyarakat dapat membangun empati dan kesadaran kritis terhadap keberagaman yang ada di sekelilingnya.

Hadirin yang saya muliakan,

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, karya seni, khususnya sastra, adalah salah satu prosedur untuk mencari dan memperlihatkan atau tidak memperlihatkan kebenaran. Kebebasan bersastra adalah kebebasan untuk bersama-sama mencari kebenaran. Tentu saja, dalam setiap prosedur dan proses pencarian terhadap kebenaran tersebut bisa saling diuji, agar kebenaran yang didapat adalah kebenaran yang paling mendekati kebenaran sejati, walaupun ini tentu sangat sulit untuk mendapatkannya. Akan tetapi, kebenaran sejati bukan tidak mungkin bisa didapatkan, minimal bisa diyakini secara subjektif.

Dalam konteks isu SARA, pencarian kebenaran melalui sastra menjadi semakin rumit karena realitas sosial yang diangkat sering kali sudah dibingkai oleh bias, stereotip, dan kepentingan tertentu. Sastra yang membahas perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan berpotensi membongkar narasi dominan yang selama ini diterima sebagai "kebenaran umum". Namun, karena kebenaran dalam isu

SARA sering kali bersifat relatif, karya sastra yang berusaha mengangkat perspektif berbeda justru bisa dianggap mengganggu stabilitas sosial atau bahkan menantang otoritas yang telah mapan.

Lebih dari sekadar menyampaikan fakta (secara intrinsik), sastra memungkinkan eksplorasi kebenaran melalui pengalaman subjektif para tokohnya. Dalam isu SARA, ini berarti menampilkan sisi kemanusiaan yang sering kali terpinggirkan oleh wacana mayoritas, membuka ruang bagi suara-suara yang jarang didengar, dan memberikan nuansa pada narasi yang sering kali disederhanakan oleh politik atau media. Dengan demikian, sastra bukan hanya alat untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi, tetapi juga sarana untuk menguji apakah yang selama ini diyakini benar memang benar adanya atau hanya ilusi yang diciptakan oleh kepentingan tertentu.

Kedua, dapat dipahami jika negara sudah seharusnya mengatur warga untuk dapat hidup lebih sejahtera, berkeadilan, aman, dan damai. Akan tetapi, kenyataannya, banyak kebijakan pemerintah (atas nama negara) tidak dalam pretensi mengamankan dan mensejahterakan warganya. Berbagai kebijakan pemerintah justru dalam rangka mengamankan kekuasaannya, dan hal tersebut bisa berkedok atas nama SARA. Hal ini tentu saja dapat dibuktikan dengan penolakan warga dan masyarakat dengan karakter kekuasaan seperti itu. Jika itu masih terjadi, warga dan rakyat Indonesia perlu menghentikan pemerintah seperti itu.

Ketiga, masyarakat, atau institusi negara dan berbagai aktivis, untuk ikut mendorong kecerdasan dan kearifan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, tidak perlu lagi ada pembatasan kriteria, atau hal-hal yang dianggap tidak boleh ditulis karena dianggap sensitif, seperti masalah SARA. Biarkan karya sastra mengeksplorasi masalah SARA, dengan kebebasan imajinatif, justru untuk mencari kebenaran. Walaupun kebenaran itu sulit didapatkan, tetapi paling tidak proses pencarian terus menerus itu membantu masyarakat untuk bertambah ilmu-pengetahuannya, untuk terus menerus membantu peningkatan kecerdasan dan kearifan.

Namun, kenyataannya, situasi tersebut masih berlangsung. Kita tahu, semua itu berjalan terus, dan terpaksa, atau merasa tidak nyaman, dan juga ada sedikit ketakutan, maka yang berjalan adalah situasi-situasi politisasi salah paham, pura-pura tidak paham/tidak tahu, atau bisa pula pura-pura kritis dan sok tahu, dan kepura-puraan lainnya. ()Sekarang, tampaknya pemerintah lebih terbuka, terlihat ada usaha untuk sedikit demokratis. Akan tetapi, kalau undang-undang SARA (UU 40/2008) dan sekarang ada UU ITE tahun 2008 (dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024) yang terus menerus mengalami banyak revisi, maka tetap akan menjadi alat negara dan masyarakat untuk mengontrol imajinasi warga dalam mencari kebenaran dalam sastra. Dengan demikian, negara, atau bahkan kita semua, sering gagap menghadapi kebenaran. Kita selalu mencari kebenaran, tetapi sebagian harus diam atau sebagian terselamur dengan konflik isu-isu dadakan yang lebih menggemparkan.

Yang bisa kita usahakan dan perjuangkan adalah bahwa kita dalam perjalanan mencari dan menuju Kebenaran. Singkat kata, saya berharap, jika ada lomba penulisan puisi, cerpen, novel, atau naskah drama, tidak perlu lagi ada kriteria “tidak menyinggung SARA”. Mari, dengan bersastra, kita terus menerus menghasut, bersama-sama, menghasut dalam pencarian menuju dan menjaga sekuat tenaga apa yang disebut sebagai Kebenaran dengan kriteria yang bisa kita sepakati bersama secara objektif.

Hadirin yang saya muliakan,

Saya akan memotong banyak ucapan terima kasih, karena saya tidak mau *mewek* di hari yang bahagia ini. Biarlah saya *mewek* sendiri ketika saya membaca ketikan aslinya, yang saya simpan di lubuk terdalam. Terima kasih saya kepada Tuhan dan Rasul. Terima kasih saya kepada orang tua saya H. Salam dan Hj. Syafiah, kepada kakak saya Erlius (alm), Irwan (alm), Usmar, Alfauzi, Ides, Ipit, Tina, Ita, Ipen, dan adik saya Dewi, kepada anak saya Ainina Zahra dan istri saya Pristi.

Begitu banyak guru-guru (harusnya begitu banyak guru, tapi *saking* banyaknya saya tulis tetap begitu banyak guru-guru) saya yang

berharga dari SD. SMP, SMA, hingga saya menyelesaikan kuliah Program Doktor. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Prof. Dr. Siti Chamamah, Prof. Dr. Rachmat Djoko Pradopo (alm.), Prof. Dr. Imran T. Abdullah (alm.) yang telah menjadi tim promotor saya. Terima kasih kepada tim penguji saya waktu itu, selain tim promotor, yakni Prof. Ida Rochani Adi, Prof. Faruk, Prof. Sjafri Sairin, Prof. Suminto A. Sayuti, Prof. Sunyoto Usman, dan Prof. Mochtar Mas' oed.

Terima kasih kepada guru-guru saya, para senior dan atasan, mungkin saya juga pernah mengambil mata kuliahnya, dan sekaligus menjadi teman diskusi; Prof. Siti Baroroh Baried, Prof. Ibrahim Alfian (alm.), Prof. Kuntowijoyo (alm.), Prof. Djoko Suryo, Prof. Timbul Haryono, Prof. Syamsul Hadi, Prof. Ida Rochani Adi, Prof. Heddy Shri Ahimsa-Putra, Prof. Marsono, Prof. Pujo Sumedi Hargo Yuwono, dan secara khusus kepada Prof. Wening Udasmoro.

Secara pribadi dan institusional ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Setiadi (Dekan FIB), para Wakil Dekan: Dr. Saktiningrum, Dr. Mimi Savitri, Dr. Suray Agung Nugroho, barisan dekanat yang luar biasa. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Bambang Hidayana (Ketua Senat FIB) dan Prof. Hendro Kumoro sebagai sekretaris Senat FIB; dan semua Guru Besar Senat FIB; Prof. Putu Wijana, Prof. Irwan Abdullah, Prof. Bambang Purwanto, Prof. Sangidu, Prof. Fadlil Munawwar Manshur, Prof. Suhandano, Prof. Sajarwo, Prof. Angraini, Prof. Atik Triratnawati, Prof. Agus Suwigyo, dan anggota senat lainnya.

Ucapan terima kasih yang besar saya sampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang menandatangani jabatan guru besar saya. Terima kasih kepada Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, M.Med.Ed.,Sp.OG(K)., Ph.D, kepada para Wakil Rektor, Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi, dan anggota Senat Akademik. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar UGM, atas persetujuan dan berbagai dukungan.

Terima kasih saya kepada guru-guru saya, kepada sahabat dan kolega di FIB UGM, dan khususnya dosen-dosen di Prodi Bahasa dan

Sastra Indonesia. Kami telah bersama-sama berproses, kepada Prof. Ramlan (alm), Dra. Siti Sundari (almh), Drs. M. Soeratno, Drs. Ramli Leman (alm.), Drs. Suhardi (alm.), Dr. Inyo Fernandez (alm), Dr. Sudaryanto, Drs. Syakir S.U (alm), Drs. Sawu, S.U, Dr. Kun Zahrun (almh.), Dr. Tri Mastoyo, Dr. Supriyadi, Drs. Aryanto, M.Hum., Dr. Sudibyso (saya biasa memanggilnya Mas Kadep), Mbak Sekdep Dra. Uswatun, M. Hum, Dr. Pujiharto (Mas Kaprodi), Dr. Novi Siti Kussuji Indrastuti, Dr. Cahyaningrum Dewojati, Dr. Rudi Ekasiswanta, Drs. Heru Marwata, M.Hum, Drs. Rakhmat Saleh, M.Hum., Drs. Ridha Marsudi Wibawa, M.Hum. Dr. Sailal Arimi, Umi Mujawazah, M.Hum, Dr. Wira Kurniawati, Dr. Ramayda Akmal, dan Saeful Anwar M.A. Juga kepada kolega dosen yang menemani saya di Prodi Magister Sastra; Ahmad Munjid, Ph.D. Mbak Dr. Hindun, , M.Hum, Mbak Dr. Saktimulya, Dr. Zulfa, Dr. Wulan, Dr. Arsanti, Dr. Ashika, Dr. Arum, Dr. Arief Rahman, Dr. Anisa Umoro, Dr. Wiastiningsih, Dr. Robi, Dr. Pangestuti, dan sebagainya.

Terima kasihku kepada tim yang keren yang telah menangani urusan-urusan birokrasi dan administrasi, kepada Mbak Erika Purnawati S.Kom., Mes , Mas Yusuf Sulistiyono, S.Psi., M.M., Mas Suryanto S.E., Mbak Dyah, Mbak Siti Rahayu, Mbak Tinuk, Mas Yoga, Mbak Umi, Mbak Vero, M.A, Mbak Rini, Mbak Atoen, Mbak Dede, Mas Suryo Wiyarno, Mbak Ani, juga kepada Ibu Kenok, dan sahabat serta kolega yang begitu banyak yang belum tersebut namanya. Tak lupa kepada Mbak Marisa Santi Dewi, M.A. dan Mbak Rina Zuliana, M.A. yang selalu siap membantu saya dalam berbagai urusan.

Teman *nongkrong* saya sejak mahasiswa *ngobrolin* soal filsafat, agama, dan hal aneh-aneh, Cak Nun, Nda Farid, Nda Wahyudi, dan belakangan Prof. Mukhtasar. Teman diskusi soal ekonomi dan politik, Dr. Yulianto, Dr. Abdul Ghofar (teman sejak mahasiswa). Teman-teman redaktur koran yang selalu memuat tulisan saya (Dari tahun 1992-1997, kami pernah mengandalkan ekonomi keluarga dari honor menulis di koran). Kepada Mbak Ninuk, Mbak Ika Kus, Mbak Ika Ayu, Mbak Wiwien, Mas Danang, dan Dr. M. Yusuf (yang sempat menemani saya di Pusat Studi Kebudayaan walaupun tidak lama). Terima kasih saya

kepada semua teman yang telah mendorong dan membantu saya hingga saya bisa menjadi Guru Besar di UGM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adichie, C.N. 2013. *Americanah*. New York: Alfred A. Knopf.
- Ajidarma, S. G. 1994. *Saksi Mata*. Yogyakarta. Bentang Budaya.
- Badiou, A. 2005. *Being and Event*. London; New York: Continuum.
- Baez, F. 2013. *Penghancuran Buku dari Masa ke Masa*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (1977). *Anti Oedipus: Capitalism and Schizophrenia*. New York: Viking.
- Djamaris, E., & Prijanto, S. (1995). *Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Faruk. 2010. *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik sampai Post-modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasmy, A. 1984. *Hamzah Fansuri: Penyair Sufi Aceh* (A. H. W. Muthari, Ed.). Jakarta: LOTKALA.
- Handoyo, V. 2019. *Lusifer! Lusifer!*. Jakarta: Post Press.
- Joyce, J. 1922. *Ulysses*. London: The Egoist Press.
- Kratz, E. U. (2000). *Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Lee, N. H. 1960. *To Kill a Mockingbird*. New York: Harper Perennial Modern Classics.
- Lubis, M. 1982. *Tanah Gersang*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Lubis, M. 1992. *Senja di Jakarta*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lubis, M. 1993. *Maut dan Cinta*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Madasary, O. 2012. *Maryam*. Jakarta: Gramedia.
- Marx, K. 1887. *Capital. Vol I*. Moscow: Progress Publisher.
- Moeis, A. 1928. *Salah Asuhan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Navis, A.A. (2002). *Robohnya Surau Kami*. Jakarta : Gramedia.
- Pasternak, B. 1958. *Doctor Zhivago*. New York: Pantheon Books, Inc.
- Razif. 2021. *Bacaan Liar: Budaya dan Politik pada Zaman Pergerakan*. Semarang: Beruang Cipta Literasi.
- Rosidi, A. 1991. *Ikhtisar Sastra Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Rushdie, S. (2008). *The Satanic Verses*. New York: Random House.

- Salam, A. 2001. *Biarkan Dia Mati, Refleksi Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salam, A. 2003. *Oposisi Sastra Sufi*. Yogyakarta: LkIS. (Judul asli tesis, Latar Belakang Bangkitnya Sastra Sufi pada 1980-1990-an).
- Salam, A. 2010. *Negara, Sastra, dan Perubahan Sosial*. Disertasi. Yogyakarta: FIB UGM
- Salam, A. 2014. “Politik Masyarakat, Negara, dan Kesenian”. *Jentera*, Vol. 3, No 1.
- Salam, A. 2014. *Politik dan Budaya Kejahatan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Salam, A. 2019. “Literasi Politik dan Sastra Partisan” dalam Fenomena Bahasa Dan Sastra Partisan Sebagai Media Literasi Politik. Yogyakarta: Anom Pustaka.
- Salam, A. 2019. *Sastra Negara dan Politik Perlawanan Sastra Sufi di Yogyakarta Tahun 1980an sampai dengan 1990an*. Yogyakarta: UGM Press.
- Salam, A. 2020. *Biokultural Dari Fantasi Kerakyatan Hingga Menolak Identitas*. Yogyakarta: Gambang Budaya.
- Salam, A. 2023. *Sosiologi Sastra Setelah Marxisme*. Yogyakarta: UGM Press.
- Stowe, H. B. 1852. *Uncle Tom’s Cabin*. London: John Cassell.
- Thukul, W. 2000. *Aku Ingin Jadi Peluru*. Yogyakarta: Indonesiatara.
- Thukul, W. 2014. *Nyanyian Akar Rumput*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Toer, P. A. 1980. *Bumi Manusia*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Tohari, A. 2003. *Ronggeng Dukuh Paruk*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Vilaça, G. V. 2014. “Badiou’s Ethics: A Return to Ideal Theory.” Dalam N. Fazioni, M. J. Kelly, & A. J. Rose (Ed.), *Journal of Badiou Studies 3: On Ethics* (hlm. 247–288). Punctum Books. <https://doi.org/10.2307/jj.2353801>
- Wellek, R., & Austin W. 1989. *Teori Kesusasteraan*. Terjemahan Melani Budianta. Jakarta: Gramedia.
- Žižek, S. 1989. *The Sublime Object of Ideology*. London: Verso.

BIODATA

Prof. Dr. Aprinus Salam, M.Hum., lahir di Riau. Setelah lulus Sekolah Dasar di Riau pada tahun 1977, Aprinus Salam hijrah ke Yogyakarta dan berdomisili di Yogya hingga kini. Pada tahun 1992, ia menyelesaikan skripsi tentang puisi. Pada tahun 1993, ia menikahi Pristi dan memiliki anak Ainina Zahra.

Pada tahun 2002, ia menyelesaikan tesis juga tentang puisi, dan tahun 2010 menyelesaikan disertasi tentang prosa/novel Indonesia di UGM. Pernah mendapat tugas sebagai Kepala Pusat Studi Kebudayaan dari 2012-2020, Konsultan Ahli di Dinas Kebudayaan Yogyakarta (2014 dan 2015), anggota Senat Akademik UGM (2012-2017), Komisi Etik Penelitian UGM (2023-sekarang).

Pada Januari 2021 (-sekarang), ia menjadi Kaprodi Magister Sastra FIB UGM. Beberapa buku telah ditulisnya, antara lain *Biarkan Dia Mati* (2001), *Oposisi Sastra Sufi* (2003), *Politik dan Budaya Kejahatan* (2015), *Kebudayaan Sebagai Tersangka* (2016), *Sastra, Negara, dan Politik* (2019), *Biokultural: Dari Fantasi Kerakyatan hingga Menolak Identitas* (2020), *Sosiologi Kehidupan: Fragmen-fragmen Teoretik* (2020), dan *Sosiologi Sastra Setelah Marxisme* (2023). Buku puisi, *Mantra Bumi* (2016), dan *Suluk Bagimu Negeri* (2017).

Pada Mei 2023, dia menerbitkan antologi cerpen *Kenapa Tidak Ada yang Menceritakan Kesedihanku?* Belum lama ini, Februari 2025, bukunya *Kesalahan dan Kejahatan dalam Berbahasa* diterbitkan Kompas (AZ).